



Dinamika Komunikasi Publik dalam Fenomena Pungutan Liar di Destinasi Wisata Pantai Koka Maumere

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Fransiska Aprilia Fenge Universitas Nusa Nipa apriyafenge@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
Markus Kristian Retu Universitas Nusa Nipa	
Intan Mustafa Universitas Nusa Nipa Intanmustafa15@gmail.com	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Fenge, F. A., Retu, M. K., & Mustafa, I. (2026). Dinamika Komunikasi Publik dalam Fenomena Pungutan Liar di Destinasi Wisata Pantai Koka Maumere. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 375-380.

Abstrak

Fenomena pungutan liar (pungli) di destinasi wisata merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada citra pariwisata, tetapi juga mencerminkan dinamika komunikasi antara pengelola, masyarakat lokal, wisatawan, dan pemerintah. Pantai Koka Maumere sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sikka tidak terlepas dari praktik pungutan liar yang memicu beragam respons publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi publik dalam fenomena pungutan liar di destinasi wisata Pantai Koka Maumere, dengan menelaah pola interaksi, persepsi, serta alur komunikasi antaraktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat lokal, wisatawan, pengelola wisata, serta aparat pemerintah terkait, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan liar muncul akibat lemahnya komunikasi kebijakan, kurangnya sosialisasi aturan resmi, serta perbedaan pemahaman antara masyarakat lokal dan wisatawan mengenai sistem pengelolaan wisata. Dinamika komunikasi publik ditandai oleh komunikasi informal, penyampaian informasi yang tidak terstruktur, serta minimnya ruang dialog partisipatif antara pemangku kepentingan. Kondisi ini memicu kesalahpahaman, konflik laten, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan destinasi wisata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal menjadi kunci dalam menekan praktik pungutan liar serta membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan di Pantai Koka Maumere.

Kata Kunci: Komunikasi Publik, Pungutan Liar, Destinasi Wisata, Pantai Koka Maumere, Pariwisata Berkelanjutan

Abstract

The phenomenon of illegal levies at tourist destinations is a social issue that not only affects the image of tourism but also reflects the dynamics of communication among managers, local communities, tourists, and government authorities. Koka Beach in Maumere, as one of the leading tourist destinations in Sikka Regency, is not free from the practice of illegal levies, which has generated various public responses. This study aims to analyze the dynamics of public communication in the phenomenon of illegal levies at the Koka Beach tourist destination in Maumere by examining interaction patterns, perceptions, and communication flows among the involved actors. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through field observations, in-depth interviews with local communities, tourists, tourism managers, and relevant government officials, as well as documentation. The findings indicate that the practice of illegal levies arises from weak policy communication, a lack of socialization of official regulations, and differing understandings between local communities and tourists regarding the tourism management system. The dynamics of public communication are characterized by informal communication, unstructured information dissemination, and the absence of participatory dialogue spaces among stakeholders. These conditions lead to misunderstandings, latent conflicts, and a decline in public trust in destination management. The study concludes that strengthening transparent, participatory public communication grounded in local wisdom is essential to reducing illegal levies and fostering sustainable tourism governance at Koka Beach, Maumere.

Keywords: Public Communication, Illegal Levies, Tourist Destinations, Koka Beach Maumere, Sustainable Tourism

A. Pendahuluan

Pantai Koka Maumere, yang terletak di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah timur Indonesia dengan bentang pesisir eksotis, air laut jernih, dan atraksi budaya masyarakat pesisir yang kuat. Potensi lanskap visual Pantai Koka menunjukkan nilai estetika tinggi yang mampu menarik wisatawan domestik maupun internasional sebagai bagian dari promosi pariwisata berbasis alam dan budaya lokal. Hal ini terlihat dari upaya evaluasi visual lanskap kawasan wisata Pantai Koka yang menunjukkan keberagaman sumber daya alam yang layak dikembangkan secara berkelanjutan untuk tujuan wisata serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. (Putra, A. N. et al 2019).

Pariwisata di Indonesia terus menjadi sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah maupun pusat gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui pemasaran, fasilitas pendukung, dan promosi destinasi. Namun demikian, pertumbuhan destinasi wisata belum selalu diikuti dengan tata kelola yang integral dan komunikasi publik yang efektif antara pemangku kepentingan terkait, seperti pengelola wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan itu sendiri.

Salah satu tantangan serius dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia adalah praktik pungutan liar (pungli). Pungli merujuk pada tindakan pemungutan uang secara tidak sah, yang dilakukan oleh oknum individu atau kelompok tertentu tanpa dasar legal, yang sering terjadi di pintu masuk lokasi wisata, area parkir, fasilitas umum, atau pelayanan lain yang semestinya bisa dijelaskan secara transparan melalui kanal resmi pengelola destinasi. Praktik ini dikenal luas dan masih terjadi di banyak objek wisata di berbagai daerah di Indonesia — sehingga menimbulkan keresahan wisatawan dan berdampak negatif terhadap citra destinasi wisata (<https://travel.detik.com>).

Berbagai kasus pungli di destinasi wisata menunjukkan fenomena yang serupa: pemungutan biaya tanpa kejelasan dasar hukum, jumlah yang ditagih tidak transparan kepada wisatawan, sampai adanya oknum yang menggunakan atribut tertentu untuk melakukan pungli meskipun tidak memiliki kewenangan resmi. Dampak langsung praktik ini dapat mengurangi kenyamanan wisatawan, menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola destinasi, dan menurunkan tingkat kunjungan ulang di masa mendatang.

Meski belum ada studi empiris khusus yang dipublikasikan mengenai pungli di Pantai Koka Maumere, fenomena ini kerap dilaporkan secara umum di beberapa destinasi wisata di Indonesia — termasuk pungli yang terpantau di objek wisata lain di Nusa Tenggara Timur — yang memberikan indikasi bahwa praktik serupa bisa saja terjadi di destinasi wisata berbasis alam seperti Pantai Koka. Hal ini perlu diinvestigasi, terutama dari aspek komunikasi publik,

mengingat peranan komunikasi dalam membentuk persepsi publik dan pengelolaan informasi sangat krusial dalam konteks pariwisata. (<https://www.antaranews.com>).

Teori komunikasi publik menekankan pentingnya proses komunikasi sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama antara pihak pengelola dan publik (masyarakat lokal serta wisatawan). Dalam konteks pariwisata, komunikasi publik yang efektif mencakup penyampaian aturan, biaya resmi, sikap terhadap praktik di lapangan, dan upaya pengelolaan konflik sosial yang mungkin timbul antara masyarakat dengan wisatawan. Ketidakjelasan komunikasi atau lemahnya kanal informasi publik sering kali menjadi celah munculnya praktik yang tidak diinginkan, seperti pungli. Misalnya, kurangnya sosialisasi terkait biaya masuk resmi dan aturan operasional destinasi wisata dapat membuka ruang bagi oknum mengambil kesempatan memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku.

Penelitian tentang komunikasi proses untuk pencegahan pungli di lokasi wisata lain, seperti Pantai Padang, menegaskan bahwa sosialisasi serta komunikasi kebijakan yang tepat berperan penting dalam pencegahan praktik pungli dan peningkatan transparansi pelayanan publik. Studi ini menunjukkan bahwa tanpa strategi komunikasi yang efektif, masyarakat lokal dan pengunjung akan tetap mengalami ketidakpastian informasi dan memicu persepsi negatif terhadap destinasi. (Oktaviardi, N. 2024).

Meskipun terdapat beberapa penelitian terkait pungli dan komunikasi di beberapa tempat wisata lain seperti Pantai Padang (yang meneliti komunikasi proses untuk mencegah pungli) dan kajian umum tentang fenomena pungli di tempat wisata Indonesia, belum ada studi empiris khusus yang membahas fenomena ini di Pantai Koka Maumere dari perspektif komunikasi publik. Kekosongan kajian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelidiki dinamika komunikasi antara pemangku kepentingan lokal, pengelola destinasi, dan wisatawan di Pantai Koka sebagai representasi destinasi wisata alam yang makin berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan menggali secara mendalam bagaimana komunikasi publik berlangsung dalam konteks praktik pungli di Pantai Koka Maumere, termasuk upaya komunikasi yang sudah dilakukan, interpretasi pesan oleh masyarakat/pengunjung, sampai pada rekomendasi strategis untuk perbaikan komunikasi publik yang lebih transparan dan partisipatif.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di ruang publik, khususnya terkait dinamika komunikasi antara pengelola destinasi wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan dalam konteks praktik pungutan liar di Pantai Koka Maumere.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, pengalaman, serta interpretasi para aktor yang terlibat secara langsung dalam fenomena pungli. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan sudut pandang partisipan dalam konteks alamiah (Creswell, 2014).

Jenis studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu lokasi spesifik, yaitu Pantai Koka Maumere, sebagai satu kesatuan sistem sosial yang memiliki karakteristik unik terkait tata kelola wisata dan komunikasi publik. Studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri fenomena secara kontekstual, mendalam, dan holistik (Yin, 2018). Penelitian ini dilaksanakan di Destinasi Wisata Pantai Koka Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena Pantai Koka merupakan salah satu destinasi wisata alam yang cukup populer, namun masih menghadapi persoalan tata kelola, termasuk dugaan praktik pungutan liar yang berdampak pada citra destinasi dan kenyamanan wisatawan.

Subjek penelitian dalam studi ini adalah para aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik komunikasi publik di Pantai Koka Maumere. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019) yakni Pengelola destinasi wisata Pantai Koka, baik formal maupun informal serta Masyarakat lokal yang beraktivitas di sekitar kawasan wisata (penjaga parkir, pedagang, atau pihak yang berinteraksi langsung dengan wisatawan). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati situasi lapangan, pola interaksi antar aktor, praktik pemungutan biaya, serta bentuk-bentuk komunikasi publik yang terjadi di kawasan wisata Pantai Koka, Wawancara mendalam

(in-depth interview) dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel namun tetap terarah pada topik komunikasi publik, pemahaman terhadap aturan biaya wisata, serta persepsi informan mengenai praktik pungutan liar serta teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi: Triangulasi sumber, Triangulasi teknik dan Triangulasi waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Praktik Pungutan di Destinasi Wisata Pantai Koka Maumere

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai informan, ditemukan bahwa praktik pungutan di kawasan wisata Pantai Koka Maumere berlangsung dalam kondisi yang relatif tidak terstandarisasi dan kurang memiliki kejelasan informasi publik. Wisatawan umumnya dikenakan sejumlah biaya ketika memasuki kawasan pantai, seperti biaya masuk, parkir kendaraan, atau pungutan lain yang diklaim sebagai kontribusi kebersihan dan keamanan. Namun, sebagian besar wisatawan menyatakan bahwa tidak terdapat papan informasi resmi yang menjelaskan dasar hukum, besaran tarif, maupun peruntukan dana yang dipungut.

Kondisi ini menimbulkan ambiguitas antara pungutan resmi dan pungutan liar. Dari perspektif komunikasi publik, ketidakjelasan pesan dan minimnya media komunikasi formal menyebabkan wisatawan sulit membedakan apakah pungutan tersebut merupakan kebijakan pengelola destinasi atau inisiatif individu/kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa praktik pungutan liar sering muncul bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga akibat lemahnya sistem komunikasi dan transparansi dalam ruang publik (Dwiyanto, 2018). Masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas pemungutan umumnya memaknai pungutan sebagai bentuk “kontribusi wajar” dari wisatawan atas pemanfaatan ruang wisata. Pemaknaan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara wisatawan dan masyarakat lokal, yang tidak dijumpai oleh komunikasi publik yang efektif. Perbedaan tafsir ini menjadi titik awal munculnya konflik laten dalam pengelolaan destinasi wisata.

Dinamika Komunikasi Publik antara Pengelola, Masyarakat, dan Wisatawan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika komunikasi publik di Pantai Koka Maumere berlangsung secara informal, lisan, dan situasional, tanpa didukung oleh sistem komunikasi yang terstruktur. Informasi mengenai aturan, biaya, dan tata kelola wisata lebih banyak disampaikan secara verbal oleh individu di lapangan, bukan melalui media komunikasi resmi seperti papan informasi, brosur, atau kanal digital. Dalam teori komunikasi publik, kondisi ini menunjukkan lemahnya komunikasi satu arah yang bersifat informatif dari pihak pengelola kepada publik. Padahal, komunikasi publik yang efektif seharusnya mampu menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan konsisten agar tidak menimbulkan multitafsir (McQuail, 2011). Ketika informasi tidak disampaikan secara terbuka, ruang publik menjadi rentan dimanfaatkan oleh aktor tertentu untuk kepentingan pribadi. Wisatawan, khususnya yang baru pertama kali berkunjung, cenderung menerima pungutan tanpa perlawanan karena tidak memiliki informasi pembandingan. Sikap ini menunjukkan adanya relasi kuasa simbolik di ruang publik wisata, di mana masyarakat lokal dipersepsikan sebagai pihak yang “berhak” mengatur kawasan. Dalam konteks ini, komunikasi publik tidak berjalan secara dialogis, melainkan bersifat asimetris. Temuan ini memperkuat pandangan Habermas (1989) tentang ruang publik, bahwa komunikasi yang tidak setara dan tidak rasional dapat mengaburkan kepentingan publik dan membuka ruang dominasi kelompok tertentu. Ketidakhadiran negara atau pengelola formal dalam komunikasi di lapangan semakin memperlemah posisi wisatawan sebagai publik pengguna jasa wisata.

Persepsi Wisatawan terhadap Pungutan Liar dan Dampaknya terhadap Citra Destinasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan memandang praktik pungutan di Pantai Koka sebagai pengalaman yang kurang nyaman, meskipun masih dapat ditoleransi dalam batas tertentu. Ketidaknyamanan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh besaran biaya, melainkan oleh cara komunikasi yang tidak transparan dan terkesan memaksa. Dalam perspektif komunikasi pariwisata, pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi pelayanan dan tata

kelola destinasi (Pitana & Gayatri, 2005). Praktik pungutan liar yang tidak dikomunikasikan secara baik berpotensi menurunkan tingkat kepuasan wisatawan dan membentuk citra negatif destinasi secara jangka panjang. Beberapa wisatawan menyatakan bahwa informasi mengenai pungutan di Pantai Koka lebih banyak diperoleh dari cerita sesama wisatawan atau media sosial, bukan dari sumber resmi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi informal dan word of mouth justru lebih dominan dibanding komunikasi publik resmi. Dalam konteks digital, pengalaman negatif wisatawan berpotensi menyebar luas dan memengaruhi persepsi publik terhadap destinasi wisata tersebut (Kotler et al., 2017). Dengan demikian, praktik pungutan liar tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, tetapi sebagai persoalan komunikasi publik yang berdampak langsung pada citra destinasi dan keberlanjutan pariwisata lokal.

Pungutan Liar sebagai Cerminan Lemahnya Tata Kelola dan Transparansi Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan liar di Pantai Koka Maumere berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola destinasi wisata dan minimnya kehadiran komunikasi institusional dari pemerintah atau pengelola resmi. Tidak adanya regulasi yang dikomunikasikan secara terbuka menciptakan ruang abu-abu antara kepentingan ekonomi masyarakat lokal dan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam konteks good governance, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan melalui komunikasi publik yang jelas dan partisipatif (UNDP, 1997). Ketika prinsip ini tidak dijalankan, praktik informal seperti pungli cenderung dianggap sebagai hal yang wajar dan sulit dikendalikan. Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa lemahnya komunikasi kebijakan dan pengawasan publik berkontribusi pada munculnya pungutan liar di sektor pelayanan publik, termasuk pariwisata (Prasetyo, 2019). Tanpa strategi komunikasi yang melibatkan masyarakat lokal secara partisipatif, upaya pemberantasan pungli hanya bersifat represif dan tidak menyentuh akar persoalan.

Implikasi Komunikasi Publik dalam Pencegahan Pungutan Liar

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan pungutan liar di destinasi wisata tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum semata, tetapi harus diiringi dengan strategi komunikasi publik yang sistematis. Penyediaan papan informasi resmi, kejelasan tarif, sosialisasi kebijakan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam komunikasi pengelolaan destinasi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan.

Komunikasi publik yang transparan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, ruang untuk praktik pungli akan semakin sempit karena publik memiliki acuan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya (Effendy, 2018).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena pungutan liar di destinasi wisata Pantai Koka Maumere merupakan persoalan sosial yang erat kaitannya dengan dinamika komunikasi publik antar pemangku kepentingan. Praktik pungutan liar tidak semata-mata muncul sebagai tindakan individual, melainkan sebagai akibat dari lemahnya komunikasi kebijakan, minimnya sosialisasi aturan resmi, serta ketidaksinkronan pemahaman antara masyarakat lokal, pengelola wisata, wisatawan, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi wisata. Dinamika komunikasi publik yang terjadi di Pantai Koka Maumere masih didominasi oleh komunikasi informal dan tidak terstruktur, tanpa adanya mekanisme komunikasi yang jelas, transparan, dan partisipatif. Ketiadaan ruang dialog yang berkelanjutan menyebabkan munculnya kesalahpahaman, konflik laten, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola destinasi wisata. Kondisi ini memperkuat praktik pungutan liar karena tidak adanya kesepakatan bersama mengenai sistem pengelolaan dan distribusi manfaat ekonomi pariwisata.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan komunikasi publik yang bersifat transparan, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal menjadi faktor kunci dalam upaya menekan praktik pungutan liar. Sinergi komunikasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pengelola wisata perlu dibangun melalui sosialisasi kebijakan yang konsisten, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta penyediaan saluran komunikasi resmi yang mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, tata kelola pariwisata yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepercayaan publik dapat terwujud di destinasi wisata Pantai Koka Maumere.

E. Referensi

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, O. U. (2018). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: Polity Press.
- https://travel.detik.com/travel-news/d-7968416/pungli-di-tempat-wisata-indonesia-tidak-ada-habisnya-ini-5-kasus-terbaru?utm_source=chatgpt.com
- https://www.antaraneews.com/berita/4851105/wamenpar-minta-praktik-pungli-tak-ada-lagi-di-destinasi-wisata?utm_source=chatgpt.com
- Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (2017). *Marketing for Hospitality and Tourism*. Boston: Pearson.
- McQuail, D. (2011). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Oktaviardi, N. (2024). *Analisis Proses Komunikasi POLRESTA Padang dalam Upaya Pencegahan PUNGLI di Pantai Padang Untuk Meningkatkan Transparansi Pelayanan Publik* (Doctoral dissertation, Universitas Dharma Andalas).
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prasetyo, A. (2019). Komunikasi kebijakan publik dan pencegahan pungutan liar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 145–158.
- Putra, A. N. D. M., Alfian, R., & Nailufar, B. (2019). EVALUASI ESTETIKA LASKAP PESISIR KAWASAN WISATA PANTAI KOKA MAUMERE FLORES NTT. *Fakultas Pertanian*, 7(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.